

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur, Sri Mulyani, and Adhi Alfian. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Agoes, Sukrisno, and Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan*. Edited by Ema Sri Suharsi. Keempat. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Agung, Anak Agung Putu. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1st ed. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Alfurkaniati, Lili Safrida, Nasirwan, Hendra Harmain, Nurlaila, Adriani Lande, Sustinah Limaryani, Yana Ermawati, and Safrita. *Pengantar Akuntansi 1*. Edited by Arfan Ikhsan. 2nd ed. Medan: Madenatera, 2017.
- Amalia, Nahdliatul, and Tika Widiastuti. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (2020): 1756.
- Arfiansyah, Mufti Arief. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/2369>.
- Arifai, Muhammad, Teuku Fakhrial Dani, and Dewi Yolanda. "Analisis Permasalahan Pelaporan Keuangan Dana Gampong Pada Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe." *Jurnal Vokasi* 1, no. 1 (2017): 1–13.
- Asrun, Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K Milono. "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikan Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 273–294.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. *Statistik Daerah Kota Lhokseumawe 2021*. Lhokseumawe, 2021. <https://lhokseumawekota.bps.go.id/publication/2021/12/30/eac3466f27c29a5dc4232ac5/statistik-daerah-kota-lhokseumawe-2021.html>.
- Bayu, Dimas J. "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020." *Indonesia Corruption Watch*. Last modified 2020. Accessed September 7, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>.
- Berutu, Ali Geno. *Aceh Dan Syariat Islam*. Jakarta, 2019.
- Dewi, Septi Indah. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*. Edited by Manunggal K. Wardaya. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Dianingrum, Silvia. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Perspektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo." *El Muhasaba* 9, no. 1 (2018). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/5407>.
- Dzafin, Calya. *Desa Maju, Negara Maju*. Edited by Daru Wijayanti. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Fatmawati, Ade Pipit, Marismiati, Khairaningrum M, and Muhammad Rizal Satria. "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman

- Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Merpati* 1 (2019): 23–27. <https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/merpati>.
- Fauzan, and Sulisty. “Etika Akuntansi Islam : Telaah Atas Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282.” *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”* (n.d.).
- Ferarow, Novi, and John Suprihanto. “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi Dan Tlogoadi Di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 2 (2018): 64–69.
- Fitriyani, Lita Yulita, Marita Marita, Widyastuti Widyastuti, and Ridho Wahyu Nurahman. “Determinants of Village Fund Allocation.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3 (2018): 526–539.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. Pertama. Malang: CV. Dream Litera Buana, 2020. <https://my.b-ok.as/book/11521939/4f1438>.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.” *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020). <http://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/2363>.
- Haidin, Sahrul. “Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 143.
- IAI-KSAP. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015.
- Indriani, Mirna, Nadirsyah, Raida Fuadi, and Evayani. “Can Siskeudes Support Village Governance in Aceh Province of Indonesia?” *Cogent Business and Management* 7, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743617>.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Edited by Andi Ulfa Tenri Pada. 1st ed. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan, and Yesi Mutia. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2018): 29–41.
- Jeffri, Riny. “Teori Stewardship Dan Good Governance.” *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3 (2018): 14–28.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa. “Implementasi Akuntabilitas Dalam Shari’ah Enterprise Theory Di Lembaga Bisnis Syari’ah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta).” *Al-Tijary* 4, no. 1 (2018): 1–12.
- Kemenkeu. *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Khaddafi, Muammar, Jubi, Syafrida Hani, Isnawati, Nur Afni Yunita, and Kamilah. *Akuntansi Biaya*. Edited by Arfan Ikhsan. Kedua. Medan: Madenatera, 2018.
- Kristanto, Septian Bayu. “Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya.” *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (2020).

- <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH/article/view/1548>.
- Kurniawan, Andri. "Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 301–314.
- Lhokseumawe, Walikota. *Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020*. Lhokseumawe, 2020.
- . "Qanun Kota Lhokseumawe" (n.d.): 1–54.
- Man, Guru, Lima Puluh, Kabupaten Batu, Bara Jl, Perintis Kemerdekaan No, Lima Puluh, Lima Puluh, et al. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam" II, no. 1 (2017): 138–157.
- Marvanti, Iga Vidya, and Sugeng Praptoyo. "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 2 (2017): 546–562.
- Masriadi. "Sempat Kabur Ke Malaysia Selama 4 Bulan, Mantan Kades Ditahan Karena Kasus Korupsi." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed September 7, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/30/140520778/sempat-kabur-ke-malaysia-selama-4-bulan-mantan-kades-ditahan-karena-kasus>.
- Mediaindonesia. "Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Di Aceh Divonis Lima Tahun Penjara." *Mediaindonesia.Com*. Last modified 2021. Accessed September 7, 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/422953/korupsi-dana-desa-kepala-desa-di-aceh-divonis-lima-tahun-penjara>.
- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syariah"*. Edited by Yusdani. Pertama. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Nafidah, Lina Nasehatun, and Nur Anisa. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang." *Akuntabilitas* 10, no. 2 (2017): 273–288.
- Novianto, Dwi. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Edited by Claudia. 1st ed. Pontianak Selatan: CV Derwati Press, 2019.
- Nurdiana, and Imran D. "Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong Buenot Kabupaten Pidie Jaya." In *Webinar Nasional Universitas Jabal Ghafur-Aceh: Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, 1:513–524, 2021.
- Nurhayati, Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 68.
- Oktara, Larasati P. *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*. Edited by Manunggal K. Wardaya. 1st ed. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Pakeh, Aduwina. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (Adg) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kab. Aceh Barat." *Jurnal Public Policy* 2, no. 1 (2018).
- Palulungan, Lusia, Gufran Kordi, M Taufan Ramli, Yunus Yudha, and Fattah Ibrahim. *Mengubah Kebijakan Publik Di Desa*. Pertama. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020. [www.batukarinfo.com](http://www.batukarinfo.com).

- Pribadiono, Agus, Fakultas Hukum, Universitas Esa, Kebon Jeruk, and Jakarta Barat. "Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa." *Lex Jurnalica* 13, no. 6 (2016).
- Primayogha, Egi. "Lonjakan Korupsi Di Desa." *Indonesia Corruption Watch*. Last modified 2018. Accessed September 7, 2021. <https://icw.or.id/o7c>.
- Purnomo, Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Seri Buku Saku UU Desa)*. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4. Yogyakarta: Infest Yogyakarta, 2016.
- Putra, Putu Andi Suar Jaya, Kadek Sinarwati, and Made Arie Wahyuni. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng." *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8, no. 2 (2017).
- Putri, Kiana. *Buku Pintar Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. 1st ed. Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016.
- Ramadanis, and Muhammad Ahyaruddin. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 9, no. 1 (2019): 110–118.
- Ramadhan, Abdul Basith. *Good Governance Dalam Islam*. Yogyakarta, 2017. <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>.
- Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Edited by Yusri Munaf. 1st ed. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Royyan, Ar, and Dkk. *Ekonomi Desa. Harian Fajar*. 1st ed. Banda Aceh: Natural Aceh, 2018.
- Salma. "Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya." *Duniadosen.Com*. Last modified 2021. Accessed November 13, 2021. <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>.
- Saragih, Ramainim, and Sarwiti Agung. "Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa)." *Institute Pertanian Bogor*, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suherman, Acep. "Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6 (2018): 128–138.
- Sululing, S, H Ode, and M G Sono. "Akuntansi Keuangan Desa." In *Seminar Nasional Dan Diskusi Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 708–717. Jakarta, 2018. <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/24>.
- Suprihatini, Amin. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Surry, Khalis. "3.942 Desa Di Aceh Sudah Cairkan Dana Desa Tahap Pertama." *Antara News*. Last modified 2021. Accessed September 8, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2111510/3942-desa-di-aceh-sudah-cairkan-dana-desa-tahap-pertama>.

- Syahputra, Dedy. *Gampong Dalam Struktur Pemerintahan Aceh*. Edited by T Saifullah. Pertama. Aceh Utara: Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2021.
- Tiarusna, Rahmatul, Jamaluddin Jamaluddin, and Ilyas Ismail. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Pada Tahun 2017." *Variasi: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim* 13, no. 2 (2021): 62–66.
- Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–155.
- Triyuwono, Edwin. *Proses Kontrak, Teori Agensi, Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)*. Makassar, 2018.
- Uliansyah, Beta Andri A., and Ikhwan Arif Rahman. "Asistensi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa." *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (2021): 50.
- Wajhannuri, Muhammad, and Ubaidullah. "Diskresi Dan Implementasi Pemerintahan Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Di Gampong Alue Krak Kayee, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH* 3 (2018).
- Widayani, Hanna. "Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun ( Analisis Terhadap Teori ‘ Ashabiyyah )" III, no. 2 (2018): 8–20.

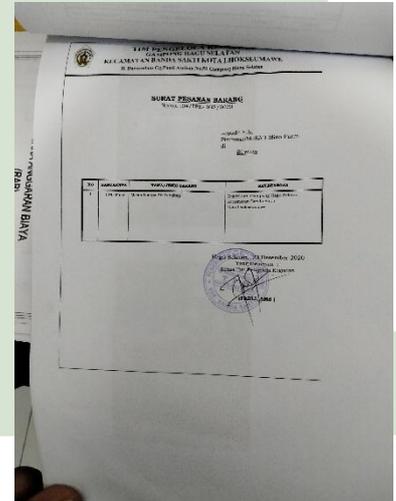
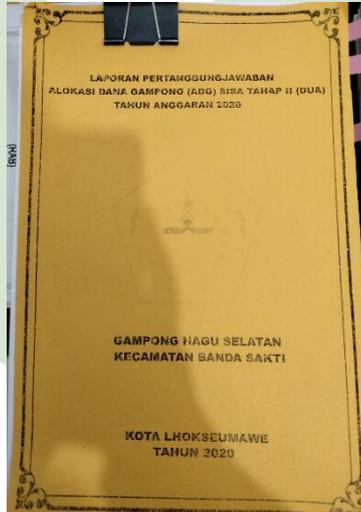
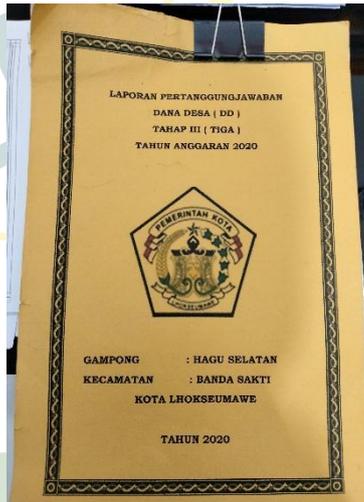
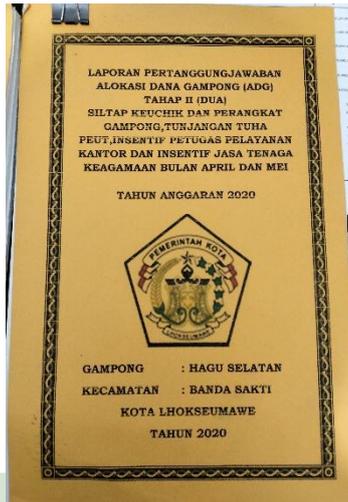


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian

1. Beberapa Laporan dari Pengelolaan Keuangan Gampong Hagu Selatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



2. Dokumentasi Aparat Gampong Hagu Selatan Bersama Masyarakat Setempat dalam Rangka Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan Program Kerja Desa yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Desa



3. Wawancara dengan Narasumber dari Aparat Gampong Hagu Selatan (Kepala Desa dan Kaur. Keuangan Desa)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Daftar Transkrip Wawancara

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN**

**KEUCHIK (KEPALA DESA) HAGU SELATAN**

**Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022**

**Tempat : Kantor Keuchik Hagu Selatan**

**Pewawancara : Cut Annisa Shalsabila**

**Narasumber : Zulfitriani**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di tahun 2020, bagaimana menurut pengawasan Bapak terhadap anggaran desa di gampong Hagu Selatan? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan?</p>	<p>Anggaran desa mengalami kenaikan dalam strukturnya. Namun, dikarenakan kita sama-sama mengalami musibah covid, ada beberapa pemotongan dana desa di seluruh Indonesia yang dialihkan sebagai biaya penanganan covid. Maka, secara praktek lapangan, anggaran desa di tahun 2020 mengalami penyusutan karena hal tersebut.</p>
2	<p>Jika pengelolaan di desa anggarannya mengalami penurunan atau penyusutan, maka apa upaya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat ikut merosot juga, Pak?</p>	<p>Ya. Karena dengan adanya pandemi, maka ruang gerak bagi masyarakat sudah pasti terbatas karena harus menuruti protokol kesehatan. Pendapatan per kapita masyarakat di sini mengalami penurunan sejak adanya pandemi. Sehingga banyak warga desa yang mengeluh susah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seperti yang saya katakan tadi, pengalihan dan desa sebagai dan penanganan covid ternyata bisa sedikit membantu masyarakat. Dalam hal ini bantuan tersebut bernama Bantuan Tunai Langsung atau BLT. Di mana, masyarakat menerima bantuan sebesar Rp 300.000 setiap bulannya dalam jangsan satu periode atau 12 bulan. Hal ini tentu sangat membantu kesejahteraan masyarakat, meski masih belum menutup kebutuhan mereka seperti sebelum pandemi. Selain itu, kita juga mendapat sokongan dana bantuan dari Baitul Maal, di mana dana dari sumber tersebut kita gunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha agar tidak gulung tikar. Sedangkan untuk pembangunan, dalam tahun 2020 terpaksa untuk ditunda dahulu. Karena kita sama-sama tahu bahwa mengelola dana desa sebagian dialihkan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam masa sulit di tengah-tengah pandemi.</p>

3	Apakah terdapat kendala-kendala dalam mengelola keuangan desa selama beberapa tahun terakhir ini, Pak?	Kalau untuk pengelolaan, Alhamdulillah kita tidak ada kendala. Dikarenakan sebelumnya ada JUKNIS juga, ada regulasinya. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.
4	Apakah perangkat-perangkat desa di sini sebelumnya sudah pernah mendapatkan sosialisasi berbentuk pelatihan akuntansi tentang bagaimana mengelola dan melaporkan arus keuangan desa?	Hampir setiap tahun kita ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas dari pemerintah daerah setempat kepada setiap perangkat desa, terutama Kaur. Keuangan. Karena tugas beliau lumayan berat, jadi tentu kami difasilitasi oleh berbagai macam pelatihan pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.
5	Apakah laporan realisasi APBDesa dan laporan-laporan keuangan lainnya di gampong ini disampaikan kepada pemerintahan kota atau kabupaten?	Ya, pastilah. Karena memang ini perintah daripada undang-undang. Perintah daripada peraturan-peraturan yang ada dan juga setiap penggunaan dana, bahkan kalau di desa ini setiap 3 bulan sekali, di awal misalnya kita mengajukan pencairan, nah sebelum melaksanakan pencairan kita harus menyelesaikan dulu laporan-laporan yang lalu. Kemudian cair tahap pertama misalnya, karena kan kita memang punya dua sumber nih, sumber DD dan sumber ADG. Nah ADG sendiri ada 4 tahap, kalau DD ada 3 tahap. Begitu pencairan tahap pertama dan kita laksanakan tahap bagian itu, Kemudian untuk mengajukan tahap berikutnya, tahap kedua yaitu harus menyiapkan laporan baru bisa mencairkan tahap kedua. Nah kemudian di akhir tahun juga, harus sudah selesai semua laporannya dari tahap pertama sampai tahap akhir dan baru diserahkan kepada pemerintahan kota. Dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
6	Apakah pembahasan mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan desa ini hanya antara perangkat desa saja atau juga melibatkan masyarakat?	Pelaporannya kalau ke masyarakat, tentu. Karena memang di dalam aturan itu sudah ada semua. Jadi, setiap akhir tahun, kita melaporkan apa-apa kegiatan yang sudah kita laksanakan, anggarannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa, dan bahkan anggaran untuk ke depannya berapa kita sudah harus melaporkan juga. Apa yang akan kita bangun. Jadi intinya, bukan hanya laporan yang sudah kita laksanakan, tetapi setelah apa yang akan kita laksanakan kita juga harus laporkan. Karena memang pada saat MUSRENBANG, kita kan melibatkan masyarakat, kemudian di samping juga ada tuha peut. Kemudian itu setelah

		MUSRENBANG kan ada penyusunan lagi dan mencari skala prioritas dari program kerja yang akan dilakukan sebelum resmi menjadi APBG, yang disebut DPA (Daftar Pengisian Anggaran).
7	Apakah prinsip akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan secara maksimal dalam gampong ini?	Sebetulnya yang menilai itu adalah kembali ke masyarakat. Karena memang kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara penggunaan dan pengelolaan anggaran dari desa ini. Tetapi kewajiban kami yang pertama, setelah kita laporkan, kita pampang baliho pelaporan tersebut yang berisi anggaran-anggarannya. Kemudian masyarakat bisa melihat sendiri. Dan kami juga mengupload itu ke dalam website, jadi masyarakat juga bisa melihat secara Online. Ada di Sistem Informasi Desa. Jadi, masyarakat bisa melihat di sana.
8	Apakah selama masa pemerintahan Bapak terdapat kendala-kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa ini?	Kita sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu, saya rasa selama ini tidak ada kendala. Walau mungkin ada beberapa regulasi-regulasi yang bertabrakan dengan perealisasi di desa. Namun, itu tidak menjadi sebuah kendala yang besar karena masih di tahap yang bisa disesuaikan, karena kita bisa mendiskusikannya dengan dinas-dinas yang menaungi desa, kita juga punya inspektorat yang memang tugasnya adalah mengaudit anggaran desa. Jadi, kita berkoordinasi dengan mereka.
9	Apakah ada dokumentasi atau bukti yang menjadi sebuah informasi bahwa prinsip akuntabilitas dalam gampong ini sudah diterapkan?	Ada berbentuk dokumen-dokumen yang bisa dilihat atau diakses oleh masyarakat dan ini menjadi bukti bahwa prinsip tersebut sudah diterapkan.
10	Apakah prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan dalam mengelola keuangan desa sudah diterapkan secara maksimal dalam gampong ini?	Sebelum anggaran itu ada, pemerintah kota biasanya memberikan pagut indikatif mengenai dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian ada ADG yang bersumber dari APBK. Kemudian ada sumber lagi dari pajak. ADG ini wajib diberikan oleh pemerintah kota kepada desa minimal 10% dari pendapatan kota Lhokseumawe. Kemudian dana desa diberikan sesuai dengan surat perintah dari presiden dari APBN. Setelah adanya pagut indikatif ini maka kami akan melakukan MUSRENBANG dan tak lupa untuk mengundang masyarakat juga. Saya rasa itu bentuk dari penerapan transparansi. Setelah memiliki RAB

		(Rencana Anggaran Belanja) berdasarkan musyawarah tersebut, dan kita mendapatkan persetujuan dan pencairan APBG, maka pelaksanaannya akan kita serahkan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat harus lihat anggarannya berapa dan pelaksanaannya bagaimana. Kalau untuk pengadaan administrasi-administrasi kantor, maka akan kita umumkan melalui media-media yang sudah kita sediakan melalui website atau masyarakat langsung datang ke kantor.
11	Apakah selama masa pemerintahan Bapak terdapat kendala-kendala dalam menerapkan prinsip transparansi untuk dana desa kepada masyarakat?	Tidak ada.
12	Apakah ada dokumentasi atau bukti yang menjadi sebuah informasi bahwa prinsip transparansi dalam gampong ini sudah diterapkan?	Ada di arsip-arsip dokumen perangkat desa.
13	Menurut Bapak, apakah pengelolaan keuangan desa di Gampong Hagu Selatan sudah menjalankan prinsip-prinsip keislaman dalam mengelola keuangan desa seperti bersih dari korupsi, bersikap terbuka kepada masyarakat, amanah dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan terutama dalam mencatat dan melaporkan keuangan desa?	Jadi, saya di sini hampir di setiap kegiatan perangkat desa selalu mengusahakan untuk hadir dan mengawasi para perangkat desa. Bahkan hampir di setiap malam kita ada pengajian di masjid. Ada kegiatan mengaji dan mendengarkan ceramah. Nah, kemudian menyangkut hal ini apakah terjadi korupsi atau tidak, itu kembali kepada manusianya. Tapi, selama para perangkat desa mampu mempertanggungjawabkan baik secara dokumentasi ataupun pelaksanaan, dan kita juga tentu ada yang mengawasi yaitu dari pihak inspektorat dan kecamatan dan juga di bawah pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), juga ada tim dari DPRD yang sering meninjau secara langsung ke kantor. Saya rasa itu sudah menjadi jawaban bahwa kami sudah semaksimal mungkin mengemban amanah ini dengan bersih. Dan saya rasa masyarakat juga wajib mengawasi, karena presiden juga berulang kali sudah mengingatkan bahwa pengawasan dana desa harus melalui masyarakat. Jadi, masyarakat bisa setiap saat bertanya dan melihat langsung bagaimana eksekusi dari pemerintahan desa ini.

14	Apakah sebelumnya Bapak sudah mendapatkan informasi bahwa dalam mencatat dan melaporkan keuangan desa itu memiliki pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI-KASP 2015 yang dapat membantu bapak dan perangkat desa lainnya dalam menyusun laporan keuangan desa?	Semua desa memang sudah difasilitasi oleh informasi ini, baik secara lisan maupun tulisan. Kami selaku perangkat desa juga selalu diberikan sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang sangat membantu dan berkaitan tentang amanah yang kami emban di sini, dan hal ini akan selalu dilakukan kembali jika ada pembaruan-pembaruan regulasi. Termasuk dalam pengelolaan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi desa.
15	Menurut Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat selama ini terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan desa gampong ini baik dari sisi akuntabilitas dan transparansi?	Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah dikatakan bahwasanya saya menyelewengkan amanah. Namun, bukan berarti saya mengatakan bahwa saya sudah sepenuhnya berhasil dalam mengelola dan mengawasi pemerintahan ini. Tapi yang jelas, sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan keluhan menyangkut dengan pengelolaan dana desa. Karena desa ini termasuk desa yang aktif dan rapi terkait setiap pendataannya. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari penyelewengkan amanah oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KAUR. KEUANGAN  
HAGU SELATAN**

**Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022**

**Tempat : Kantor Keuchik Hagu Selatan**

**Pewawancara: Cut Annisa Shalsabila**

**Narasumber : M. Jamil**

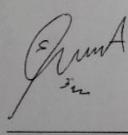
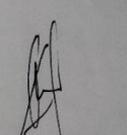
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam beberapa tahun terakhir ini, bagaimana menurut pengawasan Bapak sebagai perangkat desa yang terjun langsung terhadap pengelolaan anggaran desa di Gampong Hagu Selatan? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan?	Selama tahun 2020-sekarang, kalau anggaran pendapatan itu memang sudah dianggarkan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota untuk setiap desa. Namun, kadang-kadang ada hal yang di luar dugaan kita, seperti sekarang yang sedang covid, tentu ada pemotongan yang memang sudah langsung diatur oleh pemerintah pusat. Bukan dari pemerintahan desa. Maka, kalau dibilang ada penurunan, tentu ada penurunan.
2	Dengan anggaran desa yang ada, bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini dalam mengelola dan membuat laporan mengenai setiap arus keluar masuk dari anggaran desa?	Kita berpedoman dengan cara pencairan dana per tahap. Karena setiap tahap itu kan ada item-item pekerjaan yang harus kita lakukan. Seperti ADG ada 4 tahap, kalau DD itu ada 3 tahap yang mana ini pembuatannya sesuai dengan DPA untuk dianggarkan secara tahap demi tahap. Jumlah yang dicairkan tentu sesuai dengan yang ada di RAB.
3	Apakah terdapat kendala-kendala atau keterbatasan informasi dan keterampilan selama Bapak mengelola keuangan desa ini?	Alhamdulillah, sampai hari ini bila saya pribadi ada kendala, saya akan berkoordinasi dengan Pak Keuchik dan aparatur-aparatur gampong lainnya. Dengan cara ini, saya merasa terbantu dan pekerjaan desa bisa lancar untuk dikerjakan.
4	Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mendapatkan sosialisasi berbentuk pelatihan akuntansi tentang bagaimana mengelola dan melaporkan arus keuangan desa?	Ada, kami memang diberikan fasilitas sosialisasi seperti itu. Namanya BIMTEK Keuangan (Bimbingan Teknisi Keuangan).
5	Apakah prinsip akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan secara maksimal dalam gampong ini?	Alhamdulillah dalam gampong ini prinsip tersebut lancar-lancar saja dan tidak ada kendala. Karena kita saling koordinasi, itu yang paling utama.

6	Apakah ada dokumentasi atau bukti yang menjadi sebuah informasi bahwa prinsip akuntabilitas dalam gampong ini sudah diterapkan?	Alhamdulillah, ada. Dan kita juga membuat baliho informasi anggaran selain dari dokumen-dokumen laporan.
7	Apakah prinsip transparansi atau prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan secara maksimal dalam gampong ini?	Alhamdulillah sudah berjalan baik. Salah satu penerapannya dengan kita sediakan bukti-bukti seperti yang sudah saya katakan tadi.
8	Apakah selama masa menjabat Bapak terdapat kendala-kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa?	Alhamdulillah tidak ada, karena kita saling terbuka dan koordinasi.
9	Apakah ada dokumentasi atau bukti yang menjadi sebuah informasi bahwa prinsip transparansi dalam gampong ini sudah diterapkan?	Ada.
10	Menurut Bapak, apakah pengelolaan keuangan desa di Gampong Hagu Selatan sudah menjalankan prinsip-prinsip keislaman dalam mengelola keuangan desa seperti bersih dari korupsi, bersikap terbuka kepada masyarakat, amanah dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan terutama dalam mencatat dan melaporkan keuangan desa?	Alhamdulillah, itu yang kita utamakan. Karena ini semua amanah orang dan kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jikalau pun menghadapi kendala, kita harus saling berkoordinasi.
11	Apakah sebelumnya Bapak sudah mendapatkan informasi bahwa dalam mencatat dan melaporkan keuangan desa itu memiliki pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI-KASP 2015 yang dapat membantu Bapak dalam menyusun laporan keuangan desa?	Alhamdulillah dalam BIMTEK yang sudah pernah kita ikuti, sudah kita jalankan semaksimalnya di desa. Kalaupun ada kendala, tentu kita harus segera koordinasi kepada pengawas-pengawas pemerintahan Desa.

12	Menurut Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat selama ini terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan desa gampong ini?	Alhamdulillah tidak ada kendala dan keluhan. Tanggapan mereka sangat baik.
----	--	--

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI**

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI**

PEWAWANCARA	NARASUMBER		
	KEUCHIK	SEKRETARIS GAMPONG	KAUR. KEUANGAN
 CUT ANNISA SHALSABILA	 ZULFITRIAN	 DEDY FAKHRURRAZI, A.MD	 M. JAMIL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

1. Nama : Cut Annisa Shalsabila
2. NIM : 0502183281
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 26 Januari
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Asrama TNI-AD Hagu Selatan,  
Kota Lhokseumawe, Aceh.

### II. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2012 : SD Negeri 13 Banda Sakti
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 1 Lhokseumawe
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Lhokseumawe
4. Tahun 2018-2022 : UIN Sumatera Utara

### III. Riwayat Organisasi

1. Tahun 2015-2018 : Staff Rohis SMAN 1 Lhokseumawe
2. Tahun 2018-2019 : Kader LDK Al-Izzah UINSU
3. Tahun 2018-2020 : Kader KSEI-UIE UINSU
4. Tahun 2019-2020 : Sekdiv Humsyi Fakultas LDK
5. Tahun 2020-2021 : Staff Medikom KSEI-UIE
6. Tahun 2020-2021 : Kadiv. Keakhwatan Fakultas LDK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN